

REKOMENDASI ORAGANISASI (EKSTERNAL)
KONFERENSI CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG
Tentang “Penanggulangan Potensi dan Bahaya Kelompok Anti NKRI
Dan Pancasila di Jombang”

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir dunia, termasuk Indonesia, terus diguncang berbagai tindakan terorisme, anarkisme, dan radikalisme berbasis agama. Realitas ini tentu sesuatu yang sangat menghawatirkan bahkan berpotensi dapat menghancurkan citra Islam serta mengancam kedaulatan bangsa. Hal itu secara otomatis telah menjadi tugas bagi pemuka agama (utamanya islam) dan pemerintah untuk bersama-sama merapatkan barisan, bekerjasama membangun dan mengembalikan peran dan posisi agama (khususnya Islam) sebagai agama yang ´rahmatan Lil alamin.

Munculnya kelompok-kelompok radikal akibat perkembangan sosio-politik yang memunculkan ketidakadilan hingga menimbulkan perasaan termarginalisasi dan kekecewaan yang mendalam. Di samping faktor tersebut, masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan kelompok-kelompok radikal, misalnya kesenjangan ekonomi dan ketidak-mampuan sebagian anggota masyarakat untuk memahami perubahan yang demikian cepat terjadi. radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respons ini muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dan usaha mengganti tatanan dengan tatanan baru.

Kondisi hari ini, Indonesia (termasuk di Kabupaten Jombang) juga dihadapkan dengan masalah faham/ideologi kebangsaan, terdapat sebagian golongan yang keinginan menghegemoni atau merubah ideologi bangsa menjadi mengikuti faham agama atau aliran tertentu. Sebut saja kelompok yang selalu menyuarakan tegaknya “*khilafah*” di bumi nusantara. Gerakan-gerakan tersebut bahkan sampai mengarah pada pemanfaatan isu suku, agama dan ras (SARA). Hal ini berpotensi dapat menggerus wawasan kebangsaan dan merusak hubungan horizontal diantara warga bangsa. Munculnya kelompok Gafatar, HTI, YKPP 65/66, FPI dan lain-lain patut segera diantisipasi dan diwaspadai.

Dampak arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi mengakibatkan meningkatnya intensitas provokasi dan propaganda negatif dengan memanfaatkan media cetak, media online maupun medi sosial. Melalui media-media tersebut, tidak sedikit pula paham radikal berbasis agama atau gerakan anti NKRI dan anti pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara disebarluaskan. Gerakan-gerakan tersebut terkadang diremehkan oleh banyak kalangan, seringkali mereka tidak muncul ke permukaan padahal sebenarnya tetap potensial menjadi ancaman.

Di Kabupaten Jombang, gerakan kelompok faham radikal berbasis agama serta anti NKRI dan Pancasila sudah mulai terdeteksi bahkan mulai menyebar di lingkungan sekolah/madrasah. Pada titik ini, PCNU Kabupaten Jombang berkepentingan agar segenap pihak yang berwenang segera mengambil langkah-langkah penanganan baik bersifat deteksi dini, antisipasi, promosi maupun kurasi bahkan bila mana perlu bertindak secara tegas terhadap gerakan dan kelompok tersebut.

B. Problematika

1. Adanya potensi bahaya kelompok radikalisme berbasis agama yang anti NKRI dan Pancasila di wilayah Kabupaten Jombang.
2. Belum adanya upaya yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Jombang serta belum ketegasan pihak berwenang dalam menindak kelompok radikalisme berbasis agama

yang anti NKRI dan Pancasila di wilayah Kabupaten Jombang dengan alasan tidak memiliki payung hukum yang jelas.

3. Adanya fakta masuknya paham radikalisme berbasis agama pada sekolah-sekolah setingkat SLTA di Jombang melalui kegiatan ekstra yang bernama rohani islam (ROHIS).

C. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Jombang harus berkomitmen dan berperan aktif dalam membendung potensi tumbuh kembangnya kelompok radikalisme berbasis agama yang memiliki paham anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang dan segenap penegak hukum di Kabupaten Jombang untuk melakukan pembaruan peta kelompok radikalisme berbasis agama yang anti NKRI dan Pancasila di wilayah Kabupaten Jombang.
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang dan segenap penegak hukum di Kabupaten Jombang untuk secara kreatif, melakukan tindakan baik preventif maupun kuratif atas keberadaan kelompok radikalisme berbasis agama yang anti NKRI dan Pancasila di wilayah Kabupaten Jombang.
4. Mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Propinsi Jawa Timur di Jombang dan Kementerian Agama Kabupaten Jombang, untuk mengeluarkan intruksi kepada seluruh sekolah/madrasah agar menertibkan kurikulum/kegiatan rohani islam (ROHIS) di lingkungan sekolah/madrasah, khususnya di tingkat SLTA, agar tidak dimasuki kelompok dan paham radikal berbasis agama yang anti NKRI dan Pancasila.
5. Mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Propinsi Jawa Timur di Jombang dan Kementerian Agama Kabupaten Jombang, untuk ruang dan dukungan yang seluas-luasnya bagi munculnya kegiatan ekstra keagamaan yang mengusung nilai-nilai luhur Pancasila, semangat cinta NKRI di sekolah/madrasah, khususnya di tingkat SLTA.
6. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia dan organisasi sosial keagamaan lainnya yang berfaham moderat serta para penegak hukum di Kabupaten Jombang agar segera menyusun regulasi yang melarang penyelenggaraan kegiatan ceramah/pengajian ataupun kegiatan sejenis dan para da'i/nara sumber yang memiliki *track record* menyebarkan ujaran kebencian, memantik keresahan umat, berfaham radikal serta anti Pancasila dan NKRI di seluruh wilayah Jombang guna menjamin stabilitas social dan kerukunan ummat beragama di Kabupaten Jombang.